

## Tugas Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana secara adil dan setara; Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati; Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang; Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; Melaksanakan kewajiban lain sesual dengan peraturan perundangundangan.

## DASAR HUKUM

- o UU No. 24 tahun 2007
- o PP
- o Inpres RI no.11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

## Fungsi

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan dibidang penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- Peningkatan komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana



## Kerja Tim Terpadu

### Kegiatan Pencegahan

- o Membuat himbauan serta Instruksi yang ditujukan kepada Instansi, Pihak Perusahaan serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersamasama meningkatkan kewaspadaan dan antisifasi terhadap kebakaran hutan, lahan dan pekarangan serta fasilitas fublik yang berpotensi bencana kabut asap.
- Membuat himbauan yang ditujukan kepada Pihak Perusahaan serta seluruh lapisan masyarakat yang memiliki lahan dan perkebunan agar menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
- Menyebarluaskan informasi Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan yang Berpotensi Bencana Kabut Asap melalui media elektronic setempat:
- Membentuk Terpadu Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang di komando langsung oleh Bupati Kotawaringin Barat;
- o Mengaktifkan POSKO dan menyiapkan sumber daya yang ada untuk pemantauan dan pengendalian operasi pemadaman yakni:
- Posko BPBD
- Posko BKSDA Manggala Agni
- o Udara di Base Ops Lanud Iskandar Pangkalan Bun

## PENANGANAN PRA BENCANA

- Pemberdayaan masyarakat
- Penyadartahuan
- Pengurangan risiko karhutla
- Pelaksanaan peringatan dini, dan
- Patroli pencegahan

## Kerja Tim Terpadu

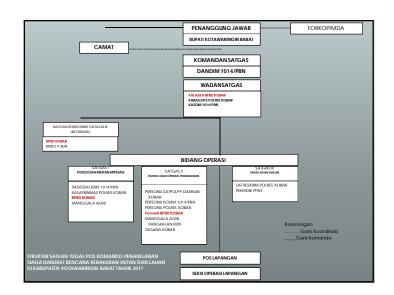
## Kegiatan Kesiapsiagaan

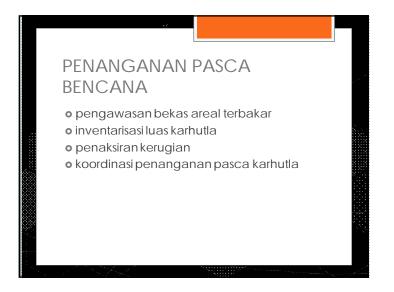
Kegiatan tersebut berupa:

- Pemantauan cuaca dan kondisi udara serta tingkat kelembaban tanah dan vegetasi yang memungkinkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta arah angin yang mengontrol penyebaran polusi asap. (BMKG Kabupaten Kotawaringin Barat);
- Pemantauan titik panas (titik api) dilakukan dengan cara memantau jumlah titik panas yang muncul/ terlihat dari data satelit (BMKG Kabupaten Kotawaringin Barat);
- Pemantauan titik api dilapangan oleh TIM Patroli;
- Pemantauan jarak pandang (Visibility) sebagai indikator atau parameter bencana dilakukan oleh BMKG;Mengintensifkan pelaksanakan penyuluhan pertanian dan perkebunan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk persiapan pertanamannya oleh Dinas terkait;
- Memberikan tindakan yang tepat bagi para pelaku pembakaran untuk memberikan efek jera bagi para pelaku oleh pihak berwenang.
- Dalamrangka antisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyiapkan rumah singgah, pembagian masker, dukungan pengobatan terhadap pasien ISPA yang terdampak kabut asap

# Penanganan darurat/pemadaman api Deteksi dini Pemadaman awal Koordinasi pemadaman Mobilisasi pemadaman Pemadaman lanjutan Demobilisasi pemadaman Evakuasi dan penyelamatan







o pengawasan bekas areal terbakar
o inventarisasi luas karhutla
o penaksiran kerugian
o koordinasi penanganan pasca karhutla

Penegakan Hukum
 Penguatan struktur organisasi

## Pengurangan risiko R<sub>isk</sub> = H<sub>azard</sub> V<sub>ulnerability</sub> C<sub>opocity</sub> o Peningkatan Kapasitas (semua elemen) o Penekanan Bahaya o Pengurangan Kerentanan

